

## Efektivitas Pemahaman Standar Akuntansi Sektor Publik terhadap Proses Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten XYZ

Khairunnisa<sup>1</sup>, Arif Fajar Wibisono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia

20312317@students.uui.ac.id<sup>1</sup>, 133121101@uui.ac.id<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*The Regional Financial and Asset Management Body (BPKAD) is a regional apparatus that has an important role in managing regional finances as well as creating and realizing accurate and reliable financial reports. This research aims to determine the presenters' understanding of public sector accounting standards in BPKAD district xyz in the process of preparing financial reporting. Encourage the realization of accountability to be responsible to society by reporting finances according to government accounting standards. Consistency in implementing government accounting standards is needed to improve the quality of regional government financial reports (LKPD). This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the research show that the understanding of financial report presenters at BPKAD The recommendations given are the need to increase human resource competency, strengthen coordination between OPDs, and provide more opportunities for staff with expertise or accounting backgrounds to join the agency.*

**Keywords:** public sector accounting standards, financial report presenters, bpkad

### ABSTRAK

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam mengelola keuangan milik daerah serta membuat dan mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman penyaji terhadap standar akuntansi sektor publik di BPKAD Kabupaten XYZ dalam proses penyusunan pelaporan keuangan. Mendorong terwujudnya akuntabilitas untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dengan melaporkan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Konsistensi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman penyaji laporan keuangan di BPKAD XYZ terhadap standar akuntansi sektor publik sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, terutama terkait koordinasi antar opd dan keterbatasan sumber daya manusia. Rekomendasi yang diberikan adalah perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar opd, serta memberi kesempatan lebih untuk tenaga yang ahli atau berlatar belakang akuntansi ikut bergabung pada instansi tersebut

**Kata kunci:** standar akuntansi sektor publik, penyaji laporan keuangan, bpkad

## PENDAHULUAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan perangkat daerah yang memiliki andil penting dalam mengelola keuangan milik daerah serta membuat dan mewujudkan laporan keuangan yang akurat dan andal. Berkualitasnya laporan keuangan sangat penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang baik oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pihak eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman penyaji terhadap standar akuntansi sektor publik di BPKAD Kabupaten XYZ dalam proses penyusunan pelaporan keuangan.

Dalam kegiatan penyusunan laporan keuangan membutuhkan kerja sama tim yang baik untuk menunjang kegiatan yang sesuai dengan aturan dan pedomannya agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan pemahaman terhadap efektivitas standar dalam penyusunan laporan keuangan yang berlaku. Standar tersebut membantu menyajikan informasi yang konsisten dan dapat dipercaya untuk mendukung keputusan dan pertanggungjawaban yang efektif. Menurut Mardiasmo (2018) Standar akuntansi adalah Pedoman akuntansi yang merupakan aturan atau prinsip-prinsip yang mengarahkan cara akuntansi disusun dalam pembuatan laporan keuangan untuk keperluan pelaporan kepada pihak yang memanfaatkan laporan tersebut. Di sisi lain, prosedur akuntansi merujuk pada tindakan khusus yang diterapkan untuk menerapkan standar tersebut. Untuk memastikan pelaksanaan prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik perlu dilengkapi dengan pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran dana publik. Keharusan standar akuntansi terletak pada upaya untuk menjamin keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Tanpa standar yang memadai, dampak negatif dapat muncul dalam bentuk kehandalan dan objektivitas informasi yang dipresentasikan, ketidaksesuaian dalam laporan keuangan, serta kesulitan dalam melakukan audit.

Menurut Pratomo & Risa Aulia Rana (2021) Teori Stewardship mendorong terwujudnya akuntabilitas oleh Steward untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dengan melaporkan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terkait pengelolaan keuangan daerah. Konsistensi dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah diperlukan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Komitmen penuh dari pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip standar akuntansi pemerintah akan meningkatkan kualitas laporan keuangan secara keseluruhan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintahan XYZ terbilang tinggi, risiko keuangan dapat meningkat, sehingga diperlukan evaluasi mendalam terhadap mekanisme penyusunan laporan keuangan yang diterapkan. Kajian ini juga mencermati sejauh mana OPD dapat diperkuat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan memastikan akuntabilitas yang baik. Dengan demikian, penelitian ini

berupaya memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi yang dapat mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen keuangan di BPKAD Kukar. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memenuhi prosedur dalam penyusunan laporan keuangan dengan segala data yang harus selalu teregulasi dan terupdate dengan kesesuaiannya yaitu data seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Operasional (LO), serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Setiap pegawai atau pekerja di bidang Laporan Keuangan pasti memiliki tanggung jawabnya masing-masing dengan jumlah organisasi perangkat daerah yang terbilang tidak sedikit, setiap pegawai mampu beberapa kegiatan seperti mengontrol organisasi perangkat daerah yang dibagi masing-masing pegawai memegang 7 OPD, menjalankan tanggung jawab atas entitas laporan keuangan yang telah dibagi dan diberikan, serta melakukan teknis operasionalnya di dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam hal tersebut membutuhkan kerja sama tim yang baik dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari meski beberapa pegawai tidak memiliki tanggung jawab yang sama, permasalahan dalam teknis yang dilakukan oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah bisa saja terjadi dalam hal tersebut membutuhkan pemecahan permasalahan yang tidak hanya ditanggung oleh pegawai yang mampu OPD tersebut maka pegawai lain harus sama-sama mencari jalan keluarnya. Dan para pegawai bisa disebut juga sebagai orang yang bertanggung jawab sebagai penyaji laporan keuangan maka pemahaman mengenai standar akuntansi pemerintahan seharusnya bukanlah hal yang awam bagi mereka.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang sebagai tugas akhir ini penulis melaksanakan kegiatan magangnya di bidang laporan keuangan yang ketika pelaksanaan magang berlangsung penulis ikut serta mekanisme dalam aktivitas bagaimana sub bidang laporan keuangan selalu mengawasi atau memonitoring para OPD. Penyusunan laporan keuangan dilakukan tidak pada saat itu juga namun kegiatan yang dilakukan yaitu menuntaskan bagaimana setiap OPD dapat memberikan data di setiap bulannya dengan melakukan monitoring dan evaluasi serta memecahkan permasalahan yang bisa saja terjadi kesalahan teknis pada organisasi perangkat daerah. Setiap pegawai harus jeli dalam mengontrol organisasi perangkat daerah agar data yang diterima oleh organisasi perangkat daerah dapat diambil keandalannya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan kegiatan pelayanan yang mencakup pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi. Tujuannya adalah menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak tertentu untuk pengambilan keputusan terkait manajemen dana publik, terutama di lembaga-lembaga pemerintahan tingkat tinggi dan departemen-departemen di bawahnya. Akuntansi pemerintahan, pada dasarnya, mencakup aspek keuangan

negara mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan, termasuk segala dampak yang dihasilkannya. (Wiratna, 2015)

## **Standar Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Hasanah dan Siregar (2021) menyatakan bahwa Standar akuntansi merupakan panduan atau dasar untuk pembuatan dan pelaporan informasi keuangan entitas publik atau pemerintah, dengan tujuan memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan. Pentingnya standar akuntansi keuangan terletak pada menjaga konsistensi pelaporan keuangan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi sektor publik terjamin. Dalam penetapan standar akuntansi, perlu mempertimbangkan beberapa kondisi, seperti memberikan dasar penjelasan yang harus terdapat dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas entitas bagi semua pihak yang berkepentingan. Standar juga memberikan petunjuk dan dasar aktivitas bagi auditor, mewajibkan pengujian yang akurat dan mandiri dengan menggunakan keahlian dan kredibilitas saat memeriksa laporan suatu entitas serta saat memverifikasi kewajarannya. Selain itu, standar memberikan informasi tentang data yang perlu dilaporkan terkait berbagai variabel dalam aspek perpajakan, peraturan, perencanaan, peraturan ekonomi, pengembangan kemampuan ekonomi, dan sasaran yang berkaitan dengan kegiatan sosial lainnya.

## **Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual**

Menurut Langelo dkk (2015) Pasal 1 ayat (8) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu, standar ini juga mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Dalam konteks neraca, basis akrual berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana dicatat saat transaksi terjadi atau saat kejadian lingkungan yang memengaruhi keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyajikan laporan keuangan. PSAP dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan sebagai bagian dari SAP Berbasis Akrual diatur dalam Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010.

## **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan adalah hasil dari sistem akuntansi, memiliki tujuan memberikan informasi yang menjadi dasar bagi para pengambil keputusan. Selain sebagai sarana informasi keuangan, laporan keuangan juga berperan sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja, terutama dalam konteks kinerja keuangan. Dalam lingkup pemerintah daerah, laporan keuangan mencakup laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan konsolidasi dari semua laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan yang disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah mencakup: Neraca-SKPD, Laporan Operasional - SKPD, Laporan Realisasi Anggaran - SKPD, Catatan Atas Laporan Keuangan. (Mahmudi, 2016).

## **Penyajian Laporan Keuangan**

Menurut Indrie Avisha (2023) Laporan keuangan pemerintah daerah berperan sebagai sarana untuk mengawasi penggunaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan publik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam bentuk lisan, melainkan juga memerlukan dokumentasi tertulis yang komprehensif. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 56 ayat (1) tentang Perbendaharaan Negara, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan kepada otoritas setempat untuk memenuhi pertanggungjawaban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan keuangan tersebut harus disampaikan kepada DPRD dan masyarakat umum. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan untuk digabungkan dalam entitas pelaporan.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dimulai dengan pendekatan induktif, yang bertumpu pada observasi partisipatif terhadap fenomena sosial. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami, menyelidiki, dan menembus kedalaman suatu fenomena sosial, serta menginterpretasikan dan menyimpulkan temuan tersebut sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mencapai kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan fenomena yang diamati, meskipun sifatnya subjektif. (Harahap, 2020)

Penelitian kualitatif fokus pada pengembangan teori substantif yang berasal dari konsep-konsep yang muncul dari data empiris. Peneliti tidak menganggap dirinya memiliki pengetahuan yang lengkap tentang subjek yang ditelitinya, sehingga desain penelitian selalu fleksibel dan terbuka terhadap kemungkinan perubahan yang diperlukan serta kondisi yang ada. (Mundir, 2013)

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya. Ini sering disebut sebagai data asli yang selalu terkini. Untuk mengakses data primer, peneliti harus mengumpulkannya langsung melalui metode seperti observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyelenggaraan kuesioner.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik BPKAD XYZ**

Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah XYZ Merupakan Perangkat daerah yang bertugas dalam mengelola keuangan dan aset daerah.

Dipimpin oleh Kepala Badan yang juga menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD), serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aminullah, seorang staf sub bidang laporan keuangan, diketahui bahwa sejak tahun 2014, pemerintah Kabupaten XZY telah menerbitkan Peraturan Bupati XYZ nomor 16 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten XYZ serta perubahannya. Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan Daerah. Sementara itu, akuntansi merupakan proses yang melibatkan pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian hasilnya, serta penyajian laporan.
3. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mencakup dasar, prinsip-prinsip, konvensi, praktik-praktik dan regulasi khusus yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dengan maksud meningkatkan perbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
4. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menjadi acuan penting bagi penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pihak terkait dalam mengatasi masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Pasal kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah XYZ menerapkan SAP Berbasis AkruaI sebagai metode pelaporan keuangan.

### **Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik**

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penerapan standar akuntansi mencerminkan tantangan umum yang dihadapi oleh entitas pemerintah daerah lainnya. Tantangan utama terletak pada kualitas pemahaman sumber daya manusia yang terkait langsung dengan pengelolaan keuangan serta para pemangku kebijakan di tingkat manajemen puncak. Hal ini menyoroti pentingnya memiliki personil yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan serta kemampuan untuk mengaplikasikan standar akuntansi dengan benar dalam konteks pengelolaan keuangan sektor publik. Menurut Eveline (2016) Sumber daya manusia merupakan aspek vital dalam organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan, dikenal sebagai Human Capital. Ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan

kemampuan yang digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan keuntungan ekonomi. Human Capital juga menjadi sumber inovasi dan gagasan, memungkinkan konsistensi dan kualitas layanan yang tinggi. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan didukung oleh Pendidikan pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Sumber daya manusia berkualitas adalah yang kompeten dalam pemahaman logika akuntansi, mampu menyusun laporan keuangan berkualitas dengan menggunakan teknologi yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

Avisha, Indrie. (2023). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor). (Skripsi Sarjana. Universitas Pakuan). <https://repository-feb.unpak.ac.id/xmlui/handle/123456789/7563>

Eka Pratama, R. N. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta). (Skripsi Sarjana. Universitas Islam Indonesia)

Eveline, F. (2016, April). Pengaruh SAP Berbasis Akrua, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas SDM, Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi terhadap Kualita Laporan Keuangan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi*, 16(1). <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/mraai/article/view/2004/1867>

Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(02). <https://anggaran.e-journal.id/akurasi/article/view/180/77>

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal ashri publishing.

Hasanah, S., & Siregar, S. R. T. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia UNIMED* 9,(1). <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/eua/article/view/25706/15973>

Kuntadi, C., Magdalena Saragi, J. E., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Internal Pemerintah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458-468. <https://doi.org/10.31933/jimt.v3i5>

Langelo, F., Elia Saerang, D. P., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Belitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(01), 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556>

# Economic Reviews Journal

Volume 3 Nomor 3 (2024) 979 – 986 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v3i3.236

Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Revisi ed.). UII Press Yogyakarta.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Andi.

Mundir. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. STAIN Jember Press.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>

Pratomo, D., & Risa Aulia Rana. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1),107.<https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/2569/1573>

Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan, 3(1).

Santoso, U., & Pambelum, Y. J. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis, 4(1), 14-33.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian.

Wiratna, S. V. (2015). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi. Pustaka Baru.